



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja No. 5 Semarang 50232  
Telepon (024) 8412547, Faksimili (024) 8412548

<https://jateng.kemenag.go.id>, email : [kanwiljateng@kemenag.go.id](mailto:kanwiljateng@kemenag.go.id)

LAPORAN  
TENTANG  
MEKANISME PEMBENTUKAN TIM PMPZI  
Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Untuk memastikan bahwa satuan kerja/UPT telah memenuhi syarat minimal WBK/WBBM maka perlu dilakukan pembinaan, penilaian pendahuluan Tim RB Unit Eselon I, TPI dan TPN.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi pada Satker di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan Zona Integritas.

b. Tujuan Kegiatan

Mewujudkan target pada Satker di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat WBK/WBBM dengan membentuk Tim Kerja PMPZI

3. Ruang Lingkup

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

#### 4. Dasar

1. Perpres Nomor 81 tentang Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
2. Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024
4. Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. KMA Nomor 633 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama
6. KMA Nomor 635 Tahun 2020 Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

#### B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

#### C. Hasil yang Dicapai

Terbentuknya Tim Kerja PMPZI Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

#### D. Simpulan dan Saran

Data Dukung Pembangunan Zona Integritas segera dilengkapi untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

#### E. Penutup

Hasil input Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada aplikasi dan Laporan Pembangunan ZI pada satker di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah oleh Tim Kerja PMPZI

Dibuat di Semarang  
Pada tanggal 15 Oktober 2020  
Kasubbag Ortala dan KUB,

TTD

Nurkholis

NOTULEN :

SUSUNAN TIM KERJA:

No.	Jabatan/Nama Pegawai	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Musta'in Ahmad	Pengarah	Tim Pengarah
2.	Fajar Adhy Nugroho	Penanggungjawab	Tim Pengarah
3.	Muh. Arifin	Ketua	Tim Pelaksana
4.	Siswo Martono	Sekretaris	Tim Pelaksana
5.	Muh. Saidun	Koordinator	Pokja Proses Manajemen Perubahan
6.	Nurkholis	Ketua	Pokja Proses Manajemen Perubahan
7.	Abdul Hamid	Sekretaris	Pokja Proses Manajemen Perubahan
8.	Miftakhudin	Anggota	Pokja Proses Manajemen Perubahan
9.	Karyanto	Koordinator	Pokja Proses Penataan Tata Laksana
10.	Fatkhurrohim	Ketua Pokja	Pokja Proses Penataan Tata Laksana
11.	Zaimatul Chasanah	Sekretaris	Pokja Proses Penataan Tata Laksana
12.	Zainul Ahmad Wijaya	Anggota	Pokja Proses Penataan Tata Laksana
13.	Imam Buchori	Koordinator	Pokja Proses Penataan Sistem Manajemen SDM
14.	Badrus Salam	Ketua Pokja	Pokja Proses Penataan Sistem Manajemen SDM
15.	Sugiyanto	Sekretaris	Pokja Proses Penataan Sistem Manajemen SDM
16.	Acmad Machrusun	Anggota	Pokja Proses Penataan Sistem Manajemen SDM
17.	A. Saifulloh	Koordinator	Pokja Proses Penguatan Akuntabilitas Kinerja
19.	Agus Machasin	Ketua Pokja	Pokja Proses Penguatan Akuntabilitas Kinerja
20.	Rohmad	Sekretaris	Pokja Proses Penguatan Akuntabilitas Kinerja
21.	Jaka Suyitna	Anggota	Pokja Proses Penguatan Akuntabilitas Kinerja
22.	Ahyani	Koordinator	Pokja Proses Penguatan Pengawasan
23.	Siti Chomariah	Ketua Pokja	Pokja Proses Penguatan Pengawasan
24.	Taufan Prihatmoko	Sekretaris	Pokja Proses Penguatan Pengawasan
25.	Tunjung Ali Nurhadi	Anggota	Pokja Proses Penguatan Pengawasan
26.	Nur Abadi	Koordinator	Pokja Proses Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
27.	Afief Mundzir	Ketua Pokja	Pokja Proses Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
28.	Linda Supriyanti	Sekretaris	Pokja Proses Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
29.	Subiddiyanto	Anggota	Pokja Proses Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
30.	I Dewa Made Artayasa	Koordinator	Pokja Hasil Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

31.	Ahmad Faridi	Ketua Pokja	Pokja Hasil Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
32.	Doni Aldise Harahap	Sekretaris	Pokja Hasil Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
33.	Munif Maknawi	Anggota	Pokja Hasil Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
34.	Sutarso	Koordinator	Pokja Hasil Kualitas Pelayanan Publik
35.	Aini Sa'adah	Ketua Pokja	Pokja Hasil Kualitas Pelayanan Publik
36.	Rizky Antasari Agustin	Sekretaris	Pokja Hasil Kualitas Pelayanan Publik
37.	Martina Wulandari	Anggota	Pokja Hasil Kualitas Pelayanan Publik



